

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 6, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Archna Sutomo, *Pemilihan kepala desa di indonesia*, PT. Ghalia Utama, Jakarta, 2007.
- Bahder Johan Nasution, *Metode penelitian Ilmu Hukum*, cet 2, CV. Mandar Maju, Bandung, 2016.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, cet. 1, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Edisi Revisi Cet.9, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Eddy Purnama, *Negara Kedaulatan Rakyat*, Nusamedia, jakarta, 2007.
- Ferry Kurnia Rizkiyansyah, *mengawal pemilu menatap demokrasi*, idea Pub, Jakarta, 2007.
- Gunawan Suswantoro, ‘*Mengawal Penegak Demokrasi*’, Erlangga, Jakarta, 2016.
- J.G. Brouwer dan Schilder, *A Survey of Dutch Administrative Law*, Ars Aequilibris, Nijmegen, 1998
- Joko J Prihatmoko, *Pemilu 2004 Konsolidasi Demokrasi*, PT Sangkala Pulsar, Jakarta, 2003.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 1989
- M. Solly Lubis, *Ilmu Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2012
- Mashudi, *Pengertian-Pengertian Alendasar Kedudukan Hukum Pemilihan umum di Indonesia Metrul Undang-Undang Dasar 1945*, Mandar Maju, Bandung, 1993.
- Muhaimin, *Golput dalam Optik Santri*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012.
- Muslim Mufti dan Didah Durrotun Naafisah, *Teori-Teori Demorasi*, Pustaka Setia. Jakarta. 2013.

Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Nura Basukia Winanrno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, LaksbangaMediatama, Yogyakarta, 2008

Salim HS dan Erlies Seftiana Nurbaini, *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan desertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013

Sirajun, Didik Sukriono, dan Winardi. *Hukum Pelayanan Publik: Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi*, Setara press, Malang, 2012.

Soejono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta, Preneda Media Group, 2012.

Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Paradoks Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*, Sinar Mulia, Jakarta, 2002

2) Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

-----, Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017. LNRI Tahun 2017 Nomor 182, TLNRI Nomor 6109.

-----, Undang-Undang Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011. LNRI Tahun 2011 Nomor 101, TLNRI Nomor 5246.

3) Jurnal

Donelly, Model lembaga penyelenggara pemilu di dunia, jurnal Lembaga Penyelenggara Pemilu, 1996.

Rofli Sulistiyo Baktiyasa1 & Lena farida, “ Pengaruh Pengawasan Kerja Dan Disiplin Kerja Terhadap Produktivitas Karyawan”, JOM FISIP Vol. 4 No. 2, 2017.

4) Internet

Bawaslu Jatim, Sejarah Pengawasan Pemilu, <http://jatim.bawaslu.go.id/sejarah-pengawasan-pemilu>, diakses pada tanggal 18 juni 2021 pukul 20.20 wib

<http://repository.usu.ac.id>, ''Sejarah Pengawas Pemilu'' diakses pada 27 Agustus 2021, Pukul 23.11 WIB.

https://agusroniarbaben.wordpress.com/2017/06/03/pengertiankewenangan-sumber-sumber-kewenangan-dan-kewenangan-membentuk-undang_undang/#:~:text=Menurut%20kamus%20besar%20bahasa%20indonesia,kewenangan%20adalah%20kekuasaan%20yang%20dilembagikan.%20, diakses pada tanggal 15 november 2020 Pukul 10.02 wib

https://liyanaira.files.wordpress.com/2013/11/638_sumberkewenangan.pdf,
Diakses pada tanggal 15 november 2020 , pukul 09:51 wib

www.Jimly.com/Jurnal/menegakkan-etika-penyelenggara-pemilu diakses pada tanggal 3 mei 2021 pukul 13.37 wib